

PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MENDUKUNG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Rahmaniar Rachman¹, Riana Anggraeny Ridwan²
STMIK Hasan Sulur Wonomulyo¹, Universitas Sulawesi Barat²
rahmaniarrachman@gmail.com¹, riana@unsulbar.ac.id²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan e-Government di Kabupaten Polewali Mandar dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar. Dalam penelitian ini penulis melihat penerapan e-Government dengan pendekatan elemen- elemen sukses penerapan e-Government. Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang saat ini terus berkembang dalam hal pelayanan publik. Maka pemanfaatan teknologi informasi merupakan satu hal yang menjadi keharusan untuk Kabupaten Polewali Mandar saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bertipe deskriptif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-Government di Kabupaten Polewali Mandar masih belum optimal hal tersebut ditinjau dari segi Support, Kapasitas maupun Kemanfaatannya (Value)

Kata Kunci: E-Government, Teknologi, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

The aim of this research is to describe the implementation of e-Government in Polewali Mandar Regency in supporting transparency and accountability of the regional government of Polewali Mandar Regency. In this research the author looks at the application of e-Government by approaching the elements of successful e-Government implementation. Polewali Mandar Regency is one of the regencies in West Sulawesi Province which is currently continuing to develop in terms of public services. So the use of information technology is something that is mandatory for Polewali Mandar Regency at this time. This research uses descriptive type qualitative research methods. Data collection uses observation, in-depth interviews, and documentation studies. The results of this research indicate that the implementation of e-Government in Polewali Mandar Regency is still not optimal in terms of Support, Capacity and Benefits (Value).

Keywords: E-Government, Technology, Local Government

PENDAHULUAN

Munculnya TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) telah memberikan kesempatan yang luas kepada publik untuk mengontrol pemerintah dan telah membuat manajemen informasi yang lebih baik. Sistem komputerisasi telah membantu pemerintah mengelola informasi namun jika tanpa keselarasan sistem komputerisasi ini juga dapat menciptakan peluang untuk korupsi dan penipuan, karena catatan elektronik lebih rentan terhadap gangguan dari catatan kertas. Dengan memanfaatkan koneksi internet, maka akan muncul sangat banyak pengembangan layanan dari pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan peran aktif masyarakat dimana diharapkan masyarakat dapat secara mandiri

melakukan registrasi perizinan, memantau proses penyelesaian, melakukan secara langsung untuk setiap perizinan dan layanan publik lainnya. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang lebih besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan, sehingga pemerintah harus mampu memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat internasional agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan bangsa Indonesia pada posisi yang serba salah. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa masyarakat ke dalam jurang *digital divide*, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi.

Menurut Dwiyanto [1] definisi pelayanan publik sebagai artian semua jenis pelayanan untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria yaitu berupa jenis barang atau jasa yang memiliki eksternalitas tinggi dan sangat diperlukan masyarakat serta penyediaannya berkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan bersama yang tercantum dalam konstitusi maupun dokumen perencanaan pemerintah, baik dalam hal memenuhi kebutuhan dan hak dasar warga negara, demi mencapai tujuan strategis pemerintah, dan memenuhi komitmen dunia internasional. Dalam hal ini pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai bentuk pelayanan berupa barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan diharapkan masyarakat mendapat kepuasan yang tinggi melalui pelayanan tersebut.

Kemudian, pelayanan pemerintahan melalui alat elektronik atau *e-government* merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk melakukan kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik berbasis *e-government* dapat mempermudah seluruh lapisan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Bentuk pelayanan melalui sistem elektronik ini memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan ranah pemerintahan.

E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Istilah *e-Government* berhubungan dengan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara pemerintah dan pelaku bisnis, dan di antara instansi pemerintah itu sendiri baik antara eksekutif, yudikatif, maupun legislatif

[2]. Semua hal tersebut dengan bantuan teknologi internet yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Mayasari (2017) [3] mengungkapkan bahwa Implementasi e-Government dapat dinyatakan lebih efektif dan efisien apabila pemerintah daerah melakukan identifikasi awal tentang kesiapan memanfaatkan fasilitas teknologi dengan lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi pendekatan deskriptif kualitatif, yang dimaksudkan untuk menjelaskan secara rinci mengenai implementasi e-government dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kabupaten polewali mandar serta dapat mengungkapkan faktor penghambat dan pendukung implementasi e-government tersebut. Data Primer dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar mengenai keterbukaan informasi dan penerapan e-government dan hasil wawancara tentang faktor implementasi e-government tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi yang berupa dokumen yang akan membantu peneliti dalam menganalisis mengenai penerapan e-government dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan studi literatur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mencakup 3 elemen yang perlu dikaji menurut metodologi untuk mengetahui kesiapan pemerintah dalam menghadapi penerapan konsep dan prinsip *e-government*, yaitu : (1) *elemen support*, (2) *elemen capacity*, dan (3) *elemen value*. *Electronic Government* atau *e-government* merupakan bentuk dari implementasi penggunaan teknologi informasi bagi pelayanan pemerintah kepada publik. Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Paradigma pelayanan pemerintah yang bercirikan pelayanan melalui birokrasi yang lamban, prosedur yang berbelit-belit dan tidak ada kepastian berusaha diatasi melalui penerapan *e-government* ini [4] . Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan e-Government. Keluarnya Instruksi Presiden RI No.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* merupakan langkah serius Pemerintah Indonesia memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di dalam proses pemerintahan dan menciptakan masyarakat Indonesia yang berbasis informasi [5]. Instruksi Presiden ini merupakan pedoman bagi

semua instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pelaksanaan e-Government. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pemahaman, keterpaduan langkah dari seluruh instansi pemerintah dalam mengaplikasikan dan mengembangkan e-Government. Maka implementasi e-Government dan pemanfaatan teknologi informasi saat ini pada umumnya dapat ditinjau dari beberapa aspek antara lain ketersediaan regulasi atau kebijakan terkait pemanfaatan TIK, ketersediaan Infrastruktur Jaringan Informasi, Pengelolaan Informasi, Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, aspek-aspek tersebut harus dikelola dengan baik agar implementasi e-Government dapat menunjukkan ke arah pembentukan e-Government yang baik [6]. Sehingga Pelayanan yang diberikan melalui situs-situs pemerintah didukung oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai untuk dapat mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.

Konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik dapat dilakukan secara sungguh-sungguh dan diperhatikan oleh sektor publik. Untuk mendukung penerapan e-government tiga elemen sukses penerapan e-Government yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh, yaitu : Support, Capacity dan Value. Perpaduan antara ketiga elemen terpenting di atas akan membentuk sebuah nexus atau pusat syaraf jaringan e-Government yang akan merupakan kunci sukses utama penjamin keberhasilan. Atau dengan kata lain, pengalaman memperlihatkan bahwa jika elemen yang menjadi fokus sebuah pemerintah yang berusaha menerapkan konsep e-Government berada di luar area ketiga elemen pembentuk nexus tersebut, maka probabilitas kegagalan proyek tersebut akan tinggi. Untuk itu menganalisis implementasi e-Government dalam pelayanan publik di Kabupaten Polewali Mandar ini penulis menggunakan pendekatan ketiga elemen sukses penerapan e-Government yaitu Elemen Support, Elemen Capacity, dan Elemen Value sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Element Support

Ditinjau Dari Sisi Kebijakan Atau Regulasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Telah Mengeluarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dalam Kerangka E-Government Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan dari sisi dukungan finansial sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah mengalokasikan rata-rata setiap tahun sebesar 3 (tiga) milyar rupiah. Sementara ditinjau dari ketersediaan sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar memiliki Jumlah Pegawai sebanyak kurang lebih 6.200 orang termasuk tenaga Pranata Komputer yang tersebar di 28 SKPD. Sedangkan dari aspek dukungan terhadap ketersediaan

infrastruktur teknologi informasi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

- a. Tersedia server di Bagian Telematika, Dispendukcapil, BKD, BPPT, DPPKA. RSUD.
- b. Tersedia web Polewali Mandar satu data (<https://satudata-v3.polmankab.go.id/>)
- c. Tersedia Sistem Aplikasi Pelayanan di Bagian Telematika, Dispendukcapil

Element Capacity

Ditinjau dari sisi kebijakan, Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dalam Kerangka E-Government Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, belum mampu mengintegrasikan semua sistem aplikasi yang dibangun oleh masing-masing SKPD karena belum ada regulasi yang lebih kuat/khusus, disisi lain SKPD belum berani share data karena adanya regulasi induk dari Pemerintah Pusat [7]. Dari aspek finansial Alokasi dana belum mampu memberikan dampak dalam pengembangan TIK yang handal, dikarenakan belum tersedia perencanaan kebutuhan infrastruktur dan sistem aplikasi di Kabupaten Polewali Mandar.

Sedangkan dari aspek Sumber Daya Manusia menjadi kendala tersendiri karena Keterbatasan Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi yang dimiliki SDM hanya pada level operator komputer (74%), sementara 26 % tersebar pada kompetensi di bidang programmer, analis sistem/data, teknisi komputer/ jaringan, administrator database dan multimedia atau sekitar 25% yang memiliki kompetensi di bidang TIK. Sementara dari aspek Infrastruktur bidang TIK cukup memadai baik ditinjau dari segi hardware maupun software, namun saat ini masih belum terintegrasi dalam satu sistem informasi Pemerintah Daerah.

Element Value

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dalam Kerangka E-Government Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar [8], SKPD di Polewali Mandar berinisiatif membangun sistem aplikasi untuk merespon tuntutan masyarakat terkait dengan percepatan pelayanan dan transparansi pelayanan, Namun demikian sistem aplikasi yang dibangun secara sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi dalam sistem informasi Kabupaten Polewali Mandar [9].

Sementara alokasi anggaran setiap tahun sudah maksimal, tetapi jika dilihat dari segi pemanfaatan untuk jangkauan pelayanan TIK secara keseluruhan belum optimal dengan dana yang tersedia. Belum lagi Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala tersendiri dalam mengembangkan sistem informasi dan Teknologi di Kabupaten Polewali Mandar. Karena pemahaman e-Government

masih sangat terbatas oleh sumber daya manusia aparatur di Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan pemanfaatan terhadap infrastruktur Teknologi informasi tersedia saat ini belum optimal karena infrastruktur TIK tersebut masih dikelola oleh SKPD Masing-masing termasuk pengolahan datanya, sehingga perilaku membagi data masih rendah, karena belum ada regulasi yang mengatur sistem informasi pemerintah daerah secara terintegrasi, sehingga infrastruktur yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan data yang diperoleh dengan pendekatan pada elemen sukses penerapan e- Government yang menjadikan pijakan dalam melakukan penelitian ini menunjukkan bahwa inisiatif tersebut di atas belum menunjukkan arah pembentukan e-Government yang baik. Berdasarkan hasil pembahasan dengan pendekatan Elemen Support, Elemen Capacity, dan Elemen Value, beberapa aspek yang menonjol adalah sebagai berikut: a. Dari sisi elemen Support, pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah dan sistem aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi yang tersedia, belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintah; b. Dari sisi elemen Capacity, belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e- Government serta terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi pada masing-masing instansi Pemerintah di Kabupaten Polewali Mandar menjadi kendala tersendiri dalam penerapan e-Government di Kabupaten Polewali Mandar, c. Dari sisi elemen Value (manfaat), penyediaan sistem aplikasi dan penyediaan infrastruktur jaringan komputer telah memberikan dampak yang positif dalam pelayanan publik, namun demikian penyediaan sistem aplikasi tersebut merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, maka sejumlah faktor seperti standarisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan untuk berinteraksi antar situs secara andal, aman, dan terpercaya untuk mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja pada instansi pemerintah ke dalam pelayanan publik yang terpadu kurang mendapatkan perhatian, d. Pendekatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tersebut tidak

cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet, sehingga jangkauan dari layanan publik yang dikembangkan menjadi terbatas pula.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Dwiyanto, "Manajemen_Pelayanan_Publik.pdf." 2005. [Online]. Available:
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=boY5EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+kepemimpinan&ots=IT5rnv09hH&sig=QeP8cqCfstSCPsbF_LWyVCR2uVc
- [2] P. Auliyaa, R. Hidayat, and R. Nababan, "Implementasi pelayanan publik berbasis e-government melalui ogan lopian," *Kinerja*, vol. 18, no. 4, pp. 502–512, 2022, doi: 10.30872/jkin.v18i4.9804.
- [3] R. F. Nurita, "Penerapan Layanan E-Government Dalam Perwujudan Good Governance Di Pemerintah Kota Malang," *J. Cakrawala Huk.*, vol. 7, no. 2, pp. 238–246, 2016, doi: 10.26905/idjch.v7i2.1914.
- [4] V. Wirawan, "Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia," *J. Penegakan Huk. dan Keadilan*, vol. 1, no. 1, pp. 1–16, 2020, doi: 10.18196/jphk.1101.
- [5] J. G. Salas, "No Title الوقعة," *CWL Publ. Enterp. Inc., Madison*, vol. 2004, p. 9, 2004, [Online]. Available:
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_2469_C.pdf
- [6] I. Mayasari, R. Hendrowati, A. Sofia, and I. Wiadi, "Implementation Of E-Government Through Implementation Of Technology Acceptance Model," *J. Apl. Manaj.*, vol. 15, pp. 659–669, Dec. 2017, doi: 10.21776/ub.jam2017.015.04.13.
- [7] G. dan Sumarno, V. D. C. Hf, M. P. Di, and V. D. C. Hf, "*Analisis. Pengaruh Bookvalue Per Share Terhadap Harga Saham Perusah. Di Bursa Efek Jakarta (Studi Kasus Perusah. Kelompok LQ-45) Oleh*," vol. 5, no. 3, pp. 1–8, 2009, [Online]. Available:
<http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- [8] Keputusan Bupati Polewali mandar, "Bupati polewali mandar," pp. 19–20, 2013.
- [9] Ф. Котлер, "No TitleМаркетинг по Котлеру," p. 282, 2008.